

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Kudus

Pagu DHBCHT Kudus Capai Rp225 Miliar

<https://jateng.tribunnews.com/2021/10/26/pagu-dhbcht-kudus-capai-rp-225-miliar>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Kudus pada Perubahan APBD 2021 mencapai Rp 225 miliar.

Rencananya anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk bermacam kegiatan, utamanya untuk alokasi kesehatan yang paling banyak alokasinya.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Eko Djumartono mengatakan, pagu sebanyak Rp 225 miliar itu terdiri atas Rp 155 miliar DBHCHT 2021 berdasarkan peraturan gubernur ditambah Rp 69 miliar dari SILPA tahun sebelumnya.

Terkait alokasi penggunaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT, kata Eko, kini sudah disepakati.

Hanya saja masih belum disahkan karena masih menunggu hasil evaluasi dari gubernur.

Setelah evaluasi dari gubernur turun, kemudian akan diparipurnakan dan disahkan.

“Kalau Rancangan APBD-nya sudah kami kirim Jumat kemarin. Termasuk yang DBHCHT,” kata Eko.

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kudus yang bakal menjalankan program kerja bersumber dari dana cukai juga telah tercatat rapi.

Kata Eko, dari total Rp 225 miliar alokasi DBHCHT, Dinas Kesehatan mendapat alokasi terbesar, yakni mencapai Rp 89 miliar.

Kemudian untuk RSUD Kudus mencapai Rp 28 miliar.

Selanjutnya, alokasi program kerja yang ditangani Bidang Perekonomian Setda Kudus yang bersumber dari dana cukai yakni mencapai Rp 45 miliar.

Rencananya akan digunakan untuk bantuan langsung tunai bagi buruh rokok.

Sedangkan alokasi untuk Disnakerperinkop-UKM Kudus mendapatkan kucuran dari dana cukai untuk menjalankan program kerja yakni sebanyak Rp 47 miliar, Diskominfo Kudus mendapat Rp 8 miliar, Bagian Hukum Rp 200 juta, dan Dinas Pertanian sebanyak Rp 6,6 miliar. (*)